

BUPATI PURWOREJO TEMUI PJ BUPATI KULONPROGO Bahas Penguatan dan Perluasan Peluang Kerja Sama

PURWOREJO (KR) - Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH melakukan pertemuan dan audiensi dengan Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkatsiwi MMA, di Novotel Hotel Kulonprogo, Senin (26/8). Pertemuan membahas penguatan dan perluasan peluang kerja sama di berbagai bidang.

"Audiensi ini sebagai tindak lanjut pertemuan saya dengan Gubernur DIY beberapa waktu lalu di IKN. Ngarso Dalem sendiri yang langsung menanyakan keberlanjutan pertemuan kami dengan Pj Bupati Kulon Progo yang lama dan jajarannya, khususnya terkait air bersih," kata Yuli, Selasa (27/8). Dijelaskan, selain peluang kerja sama terkait air bersih, Pemkab Purworejo juga berharap ada kerja sama pada bidang lainnya. Seperti UMKM, pariwisata dan pengembangan border city yang berbatasan langsung dengan Kulonprogo.

"Purworejo dan Kulonprogo itu tidak hanya sebatas wilayah yang bersebelahan, namun tentunya telah memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kami berharap kedua daerah ini bisa menjadi kawasan fungsional aerotropolis yang dapat menyatu untuk mendukung keberadaan Bandara YIA," jelasnya.

Mengutip pernyataan Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkatsiwi MMA, Yuli menambahkan, Pemkab Kulon Progo dalam sebuah kerja sama juga melihat hubungan mutualisme yakni saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Keuntungan bagi pemerintah bentuknya tidak hanya rupiah, namun juga bagaimana masyarakat nantinya dapat menjadi lebih sejahtera. "Harapan Pemkab Kulon Progo nanti ada sebuah kesepakatan, tentunya ada rentang waktu. Bagaimana proses kerja sama dari sisi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Nanti akan dilihat apa saja yang bisa disinergikan," ucapnya.

Ikut hadir dalam audiensi tersebut, Sekda Purworejo Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA, Direktur Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Purworejo Hermawan Wahyu Utomo ST MSi dan sejumlah pejabat Pemkab Purworejo. Dari Kulon Progo, hadir Sekda Triyono SIP MSi beserta sejumlah pejabat setempat. (*-5)-f



Audiensi Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH dan Pj Bupati Kulonprogo Ir Srie Nurkatsiwi MMA.

Bantuan Makanan Bergizi Atasi Kemiskinan

SEMARANG (KR) - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menggalakkan kegiatan pemberian makanan bergizi untuk anak dan ibu hamil. Hal itu untuk mengatasi problem kemiskinan dan stunting di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan melalui program desa Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Nana Sudjana mengatakan hal itu saat mengecek pelaksanaan program Desa B2SA di SD Bedono II, Kecamatan Semarang Jambu, Kabupaten Semarang Selasa (27/8). Pemrov Jateng pada 2024 ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 240 Juta untuk pengembangan desa B2SA di 15 Kabupaten / kota. Masing-masing desa mendapatkan Rp16 juta dengan kegiatan berupa pemberian makan bergizi kepada siswa SD.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mengalokasikan anggaran Rp600 juta untuk kegiatan rumah pangan B2SA di Jateng untuk 10 kelompok, masing-masing Rp60 juta. Kegiatannya berupa pemberian makan bergizi untuk anak balita dan ibu hamil sebanyak 50 ñ 60 kali dalam 1 tahun (2-3 kali seminggu).

Lokasinya berada 10 kabupaten/kota di Jateng.

Nana Sudjana mengecek langsung makanan yang diberikan kepada siswi SD yang totalnya berjumlah 526 anak. Siswa-siswa tersebut berasal dari SD Bedono II, SD Bedono III, Madrasah Ibtidaiyah Jeruk Wangi dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Bedono. Selain diberikan kepada pelajar SD, makanan juga disajikan kepada balita stunting dan ibu hamil yang terindikasi kekurangan energi kronis. Mereka mendapatkan menu nasi, sop, tempe goreng, ayam goreng crispy, ungkep daging giling, susu dan buah.

"Menunya saya rasa sangat baik, dan ini akan terus kami kembangkan. Program ini sebenarnya bukan hanya di provinsi saja, di kabupaten/ kota juga sudah dilakukan. Sudah ada beberapa yang melakukan simulasi ini," tutur Nana didampingi Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI Chandra Rahmansyah.

Nana Sudjana mengatakan, untuk saat ini, program tersebut dilaksanakan di daerah rawan pangan dan angka stuntingnya tinggi.



KR-Budiono

Nana Sudjana menyaksikan siswa SD Bedono II, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, makan dengan makanan bergizi bantuan Pemrov Jateng.

Program ini akan terus dilakukan, untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Pelaksanaan program Desa B2SA di Desa Bedono juga dilengkapi dengan Program Gerakan Pangan Murah (GPM), sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan bergizi dengan harga murah.

Ketua Tim Penggerak PKK Desa

Bedono, Siti menyampaikan, penyediaan makanan B2SA bagi ibu hamil dan balita stunting dikerjakan dengan organisasi PKK. Para kader PKK dibimbing ahli gizi dan Bapanas, serta mendapat dukungan dari Kelompok Wanita Tani (KWT) di desanya. Pasokan bahan pangan diperoleh dari KWT, sehingga mendapat bahan pangan yang terjamin sehat dan segar. (Bdi)-f

Bawaslu Ajak Masyarakat Jadi Panwas

MAGELANG (KR) - Bawaslu Kabupaten Magelang menggelar kegiatan Bawaslu Kabupaten Magelang "Bersholawat" di Lapangan drh Soepardi Sawitan Magelang bersama Gus Azmi dan Gus Hafidz, Selasa (27/8) malam. Kegiatan ini dalam rangka mensosialisasikan pengawasan partisipatif.

"Kami ingin mengajak masyarakat ikut mengawasi pemilu menjadi panwas lillahi ta'ala," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Saleh kepada wartawan, Selasa malam. Lewat kegiatan ini juga diluncurkan peta kerawanan Pilkada 2024, baik dari aspek kerawanan tinggi, sedang maupun rendah.

Selasa malam itu juga launching 13 Desa Anti Politik Uang (APU). Desa APU ini menjadi salah satu

pusat edukasi masyarakat, yang diharapkan nanti masyarakat teredukasi, masyarakat kemudian juga ikut mengawasi pilkada. "Kita juga berharap lewat pusat-pusat edukasi publik ini masyarakat dapat mengembangkan diri untuk ikut bersama Bawaslu menggelindingkan gerakan tolak politik uang," kata Habib.

Berkaitan dengan beberapa kerawanan tersebut, dikatakan, kerawanan tinggi itu pada aspek pe-

mungutannya atau pemilihan. Dalam Pemilu serentak Tahun 2024 lalu di wilayah Kabupaten Magelang ada 5 yang PSU. Kerawanan sedang ada pada aspek kampanye, dan kerawanan rendah pada aspek netralitas aparat pemerintah atau netralitas ASN.

Kaitannya dengan keberadaan TPS di Lokasi Khusus (TPS Lokus), dikatakan, berdasarkan Pemilu 2024 lalu keberadaan TPS Lokus masuk dalam kategori rawan kaitannya dengan potensi PSU. Hal ini sudah dipetakan kerawannya, dan Bawaslu bekerjasama dengan KPU, bagaimana agar kerawanan ini tidak terjadi. Salah satu fungsi dari pemetaan kerawanan ini adalah melakukan pendeteksian dini ada potensi yang rawan. "Kem-

dian kita bersama-sama mencegah agar kerawanan ini tidak terjadi," tambahnya.

Di forum yang dihadiri perwakilan dari Bawaslu Provinsi Jateng Nur Kholiq, Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto maupun lainnya, Habib mengatakan sosialisasi ini bertajuk Bawaslu Kabupaten Magelang Bersholawat "Nyadong Syafaat Pilkada Bermartabat."

"Mari bersama Gus Azmi dan Gus Hafidz kita bersama-sama Melangkitkan doa untuk membunikan harapan demi Pilkada Bermartabat dan Berintegritas. Semoga tercipta kedamaian dan kesejahteraan untuk Indonesia khususnya Kabupaten Magelang," kata Habib. (Tha)-f

Ada Tanah Pemkab Purworejo Belum Bersertipikat

PURWOREJO (KR) - Ternyata masih ada tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo yang belum bersertipikat, tanah tersebut didominasi tanah yang peruntukannya untuk jalan dan saluran. Selebihnya tanah belum dapat dilakukan pensertipikatan, karena terkendala asal-usul perolehan masa lalu.

Hal itu diungkapkan Pj Sekda Kabupaten Purworejo Drs Achmad Kurniawan Kadir MPA saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Strategi Penyelesaian Permasalahan Pensertipikatan Tanah Milik Pemkab Purworejo di The Alana Hotel Yogyakarta, Senin (26/8).

Pj Sekda juga sempat menyerahkan sertifikat penghargaan dan empat buah mesin printer kepada Wahyudi Widodo selaku perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. "Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sangat berperan dalam percepatan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Daerah. Pemkab terus berkolaborasi dan berupaya bersama Kantor Pertanahan, untuk melaksanakan pensertipikatan tanah milik pemerintah daerah," ucap Achmad Kurniawan Kadir.

Menurutnya, sejak tahun 2022 - 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo telah mampu menerbitkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo sebanyak kurang lebih 2.154 sertifikat. Hal itu menjadi bukti peran penting Kantor Pertanahan sehingga laik menerima penghargaan dari KPK RI, sebagai Kantor Pertanahan dengan penerbitan sertifikat tanah pemerintah daerah terbanyak tahun 2023 di Provinsi Jateng.

"Kami mengucapkan banyak terima kasih sekaligus ingin memberikan penghargaan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Saya juga berharap FGD ini dapat menghasilkan solusi terbaik untuk mengatasi kendala yang ada," ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Purworejo, Agus Ari Setiyadi SSos menambahkan, setiap tahun akan dianggarkan pensertipikatan tanah. Hal itu sesuai amanah peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah dan juga NCB KPK sampai kapanpun akan dituntaskan. (*-5)-f

Pasangan Hadi-Sugeng Daftar ke KPU Grobogan



KR-M Taslim

Ketua KPU Grobogan saat menerima berkas pendaftaran pasangan Hadi-Sugeng.

GROBOGAN (KR) - Pujiyanto - Catur Sugeng Prasetyo akan diusung satu parpol PKB. Kemudian dukungan dari partai nonparlemen PAN, Perindo, Garuda, Ummat, Buruh, Gelora dan PKN. Pasangan Setyo Hadi - Sugeng Prasetyo sudah mendaftar ke KPU Grobogan, Rabu (28/8). Sedangkan paslon Bambang Pujiyanto - Catur Sugeng Prasetyo yang mendapakan dukungan mayoritas parpol yang memiliki kursi di DPRD Grobogan. Yakni PDIP, Gerindra, Hanura, PPP, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, plus PSI yang tidak memiliki kursi di DPRD Grobogan.

Kedua paslon Bambang

pencalonan di kompleks rumah Ketua DPC PDIP Grobogan Sri Sumarni di Desa Putat Kecamatan Purwodadi. Para pimpinan parpol pengusung itu pun tampak hadir. Yakni Ketua DPC PDIP Grobogan Sri Sumarni, Ketua DPC Hanura Setiawan Djoko Purwanto, Ketua DPC PPP M Fatah, Ketua DPD PKS Suranto. Kemudian Ketua DPC Demokrat Arif Miftakul Huda, Ketua DPC NasDem Sholikin, dan Ketua DPD Golkar M Sidiq.

Dalam deklarasi tersebut, seluruh pimpinan parpol yakni ketua, sekretaris dan bendahara maju ke atas panggung dan menyatakan mendukung pasangan Hadi - Sugeng. Deklarasi dibimbing oleh Sekretaris DPC PDIP Grobogan Agus Siswanto. Hadi sempat memberikan sambutan dalam deklarasi ini. Ia minta doa restu untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Grobogan. (Tas)-f

KPK Ajak DPRD Kabupaten Magelang Cegah Tindak Pidana Korupsi



DPRD Kab. Magelang

MAGELANG (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (27/08). Kunjungan dari KPK ke kantor DPRD Kabupaten Magelang ini bertujuan untuk membahas dan meningkatkan pemahaman serta keterlibatan DPRD dalam penerapan MCP di Pemerintahan Kabupaten Magelang. Sehingga memberikan kontribusi positif tentang tata kelola penertiban yang efektif dan efisien.

Monitoring Center for Prevention (MCP) sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Magelang, Saryan Adiyanto mengatakan, sesuai dengan perspektif hukum, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 pasal dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan ke dalam banyak bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pada dasarnya, bentuk/jenis tindak pidana

korupsi tersebut dapat diringkas dalam 7 (tujuh) kelompok perbuatan yakni korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan pada negara, suap, menyuap penggelapan jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam hal pengadaan dan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merugikan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

"Maka saya yakin bahwa kita semua dapat mewujudkan untuk mengikis habis tindak pidana korupsi ini, dan bilamana hal ini terus kita kembangkan, maka saya yakin bahwa hal tersebut akan mewarnai budaya kerja kita untuk anti korupsi," katanya.

Pencegahan korupsi telah dilakukan oleh KPK melalui monitoring or prevention center MCP yang sudah dilaksanakan dalam empat tahun ini dan untuk capaian MCP Kabupaten Magelang pada tahun 2023 mencapai 88,21 %. Capaian tahun 2023 tersebut turun dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang mencapai 92,27 %. Dengan capaian di tahun 2023 tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang berada di urutan ke -32 di tingkat provinsi Jawa Tengah dan di urutan ke-169 di tingkat nasional.

"Selanjutnya untuk tahun 2024 ini, kita harapkan

kan capaian MCP pemerintah Kabupaten Magelang dapat meningkat seiring dengan langkah perbaikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang," harapnya.

Saryan juga berpesan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Magelang untuk bersama-sama membangun integritas kelembagaan ini. Supaya bisa melakukan fungsi-fungsinya sebaik mungkin. "Baik dari sisi fungsi pengawasan, penganggaran, maupun dari fungsi legislasi," ujarnya.

Sementara itu, Sri Kuncoro Hadi, Kasatgas 3.3 Korusp KPK mengatakan, dalam kesempatan ini KPK datang dalam suasana pencegahan terkait dengan Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

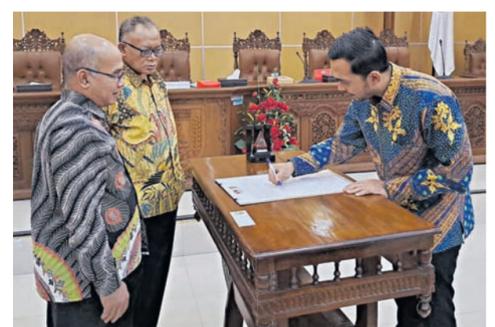
Penelitian dan pengalangan Petugas KPK menunjukkan bahwa titik rawan Korupsi di Pemerintah Daerah adalah Pembagian dan Pengaturan jatah proyek APBD, Uang ketok pembahasan dan pengesahan APBD, Meminta/menerima hadiah pada proses perencanaan APBD, Dana aspirasi, Pokir yang tidak sah,

Perizinan dan pelayanan publik, Pelaksanaan PBJ, Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.

Salah satu langkah atau upaya dalam pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah sendiri bisa melalui pemantauan dan penilaian, yang nantinya bisa dilaporkan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat diakses melalui JAGA.ID. Penilaian atas upaya pencegahan korupsi daerah dilakukan secara bersama oleh KPK, Kemendagri, dan BPKP dengan jangka waktu setiap tahun.

Monitoring Center for Prevention (MCP) mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik daerah melalui 8 area intervensi yang dilengkapi dengan indikator dan sub indikator yang dilakukan evaluasi setiap tahun.

"Di sinilah kami hadir untuk mengajak anggota DPRD yang mempunyai tiga fungsi di dalam pelaksanaan Pemerintahan yang kebetulan bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk kita bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi serta mendorong nilai SPI," tutur Kuncoro Hadi. (Adv)-f



KR-Dokumen DPRD Kab Magelang

Penandatanganan pernyataan komitmen anti-korupsi oleh KPK dan DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (27/8/2024).